

Dewan Ancam Kepung Puspem

Eksekutif Sebut Hibah masih Dicarikan Solusi

MANGUPURA - Hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Badung belum juga ada tanda-tanda cair. Hingga kemarin (8/10), hubungan dua lembaga itu justru makin memanas. Ini ditunjukkan dengan ancaman kalangan DPRD Badung yang akan mendatangkan ribuan massa untuk mengepung kantor bupati. Ancaman, itu dilontarkan Sekretaris

Fraksi Gerindra Nyoman Sentana.

Kepada koran ini Sentana menandakan, selain menggalang mosi tidak percaya (MTP) kepada dewan juga memberikan *deadline* pada eksekutif. Apabila dalam waktu seminggu dana hibah tidak juga cair, maka Sentana dan dewan lain akan menyuruh warga pemilik proposal hibah datang ke kantor bupati.

"Saya rasa kalau semua warga yang mengajukan proposal itu datang ke kantor bupati, maka puspem itu akan penuh. Ribuan orang akan datang. Kalau perlu, saya suruh itu

warga menginap di kantor bupati," ujar Sentana. "Intinya kami beri *deadline* seminggu," imbuhnya.

Sentana juga kembali menegaskan jika dewan masih akan konsisten memboikot pembahasan APBD 2016. Politisi asal Blahkiuh, Abiansemal, ini menganggap tindakan itu diambil karena selama ini penjabat bupati (Pj) Badung dan Sekkab dinilai sengaja menghambat pencairan hibah. Pasalnya, berdasarkan hasil konsultasi dengan Pemprov Bali, hibah bisa cair asal ada peraturan bupati



Saya rasa kalau semua warga yang mengajukan proposal itu datang ke kantor bupati, maka puspem itu akan penuh. Ribuan orang akan datang. Kalau perlu, saya suruh warga menginap di kantor bupati."

Nyoman Sentana
Sekretaris F-Gerindra DPRD Badung

(Perbup). Namun, Pj bupati tak kunjung membuat perbup itu.

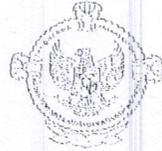
"Kami sudah tidak punya muka lagi di masyarakat. Kami selalu ditodong hibah. Hibah itu bukan untuk dewan, tapi untuk rakyat. Kami hanya memfasilitasi saja," sodoknya.

Sementara itu, juru bicara Pemkab Badung AA Raka Yuda menanggapi ancaman itu dengan normatif. Gung Raka dengan nada halus meminta agar dewan bersikap bijaksana dalam melakukan sesuatu ■

► **Baca Dewan... Hal 35**

Edisi : Jumat, 9 Oktober 2015

Hal. : 25



Sambungan - - -

Pemprov Segera Cairkan Hibah

■ DEWAN

Sambungan dari hal 25

"Saya kira ancaman itu perlu dipikirkan ulang. Apakah hal itu termasuk bijaksana atau tidak. Semua harus disikapi dengan dewasa agar semua dalam kondisi aman," ujar Gung Raka. Penekun yoga ini menyebut

saat ini Pemkab Badung masih terus mencari formula agar permasalahan hibah bisa dicarikan jalan keluar. Eksekutif dan tim ahli sudah berkali-kali melakukan rapat untuk mencari solusi terbaik. Untuk hibah, lanjut Gung Raka, akan dikaji pencairan dana hibah apabila proposal hibah yang diajukan berupa bangunan,

maka bisa dialokasikan dalam kegiatan eksekutif. "Kami eksekutif juga terus berusaha agar masalah ini selesai tapi tidak sampai masuk ke ranah hukum. Harusnya dewan juga bekerja keras dan meyakinkan konstituennya agar tenang," beber Gung Raka.

Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Bali juga geram terkait

dana hibah ini. Bahkan, dalam rapat gabungan antara eksekutif dan legislatif, para anggota Dewan Bali kembali menagih dan menuntut untuk segera dilakukan pencairan dana hibah.

Desakan agar dana hibah segera dicairkan itu disampaikan salah satu anggota Fraksi PDI Perjuangan asal

Bangli Nyoman Adnyana.

Mewakili anggota dewan lainnya, Adnyana dihadapan gubernur dan SKPD kembali mempertanyakan dan mendesak pencairan dana hibah yang hingga kini masih terkendala. "Saya yakin gubernur sangat aspiratif terhadap persoalan ini dan gubernur pasti mendengar apa yang menjadi suara rakyat," ujarnya.

Sedangkan atas permintaan, itu Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan dan berjanji akan segera mencairkannya.

"Saya tetap akan komit untuk mencairkannya dan hari ini dikabarkan pergub akan turun sementara surat keputusan (SK) untuk pencairan semuanya sudah saya teken," ujar Pastika, kemarin

Alasan gubernur untuk mencairkan dana hibah yang direkomendasikan oleh DPRD Bali, itu yakni sesuai hasil penjangkaran aspirasi ke masyarakat dan demi kebaikan rakyat Bali secara keseluruhan. "Hal itu juga demi kebaikan semua anggota DPRD Bali yang selama ini sudah berjanji pada rakyat," tegasnya.

Masih dalam kesempatan itu, gubernur juga mengaku sampai harus begadang dan lembur sampai pagi untuk menuntaskan penandatanganan guna pencairan dana hibah segera bisa dilakukan setelah pergub turun. "Saya sampai *bebiyunan* (pegel) teken, ini demi kebaikan rakyat dan demi janji-janji dewan pada rakyat dan memang saya janji. Akan tetapi yang akan bertanggungjawab adalah saya," pungkasnya. (san/pra/yes)



Potensi Kehilangan Pajak Capai Rp 3,2 T

MANGUPURA - Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung sebesar Rp 2,8 triliun saat ini ternyata masih jauh dari kata ideal. Pasalnya, potensi pajak di Badung bisa digenjot hingga Rp 6 triliun

► *Baca Potensi... Hal 35*

Kalkulasi Kehilangan Pajak di Badung

- Jika tingkat hunian dihitung kasar hanya 25 persen serta rate USD hanya Rp 10.000, maka potensi PHR Badung mencapai Rp 6 triliun.
- Nilai itu didapat dari jumlah kamar 10 ribu dikalikan room rate dikalikan 10 persen. Karena PAD Badung hanya Rp 2,8 triliun, maka lost pajak hotel Badung selama ini mencapai Rp 3,2 triliun.
- Sebagai solusi DPRD Badung merancang perda pajak online karena tipping box yang ditempatkan di sejumlah hotel masih dioperasikan secara manual.

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Wisatawan Senang Ombak Kuta

■ POTENSI

Sambungan dari hal 25

Komisi III DPRD Badung yang mengawasi keuangan menyebut, selama ini potensi pajak di Badung terutama pajak hotel dan restoran (PHR) sering hilang. Hilangnya pajak ini akibat tidak maksimalnya penerapan sistem pajak online.

Ketua Komisi III Nyoman Satria membeberkan, PAD sebesar Rp 6 triliun itu didapat dari perhitungan tingkat hunian hotel dan rate USD. Menurut Satria, jika tingkat hunian dihitung kasar hanya 25 persen serta rate USD hanya Rp 10.000, maka potensi PHR Badung mencapai Rp 6 triliun. "Dari jumlah kamar 10 ribu saja, kemudian dikalikan room rate dikalikan 10 persen. Dengan begitu, lost pajak hotel

Badung selama ini mencapai Rp 3,2 triliun karena PAD Badung saat ini baru Rp 2,8 triliun," jelas Satria kepada awak media di gedung DPRD Badung, kemarin (8/10). "Itu hitung-hitungan sederhana dan kami memperoleh angka tersebut," imbuhnya.

Satria menilai PHR perlu dibuatkan perda online. Dengan penerapan pajak online ini, pihaknya merancang peningkatan pajak hotel hingga Rp 500 miliar pada 2016 dan Rp 500 miliar pada 2017. Sehingga dalam waktu dua tahun, pihaknya menargetkan pajak hotel meningkat hingga Rp 1 triliun.

Ditanya soal *tipping box* yang telah terpasang di sejumlah objek pajak, Satria menyebut itu belum merupakan penerapan pajak online secara penuh. Menurutnya, *tipping box* masih dioperasikan secara manual. "Bisa saja transaksi yang terjadi tidak dimasukkan secara

penuh," imbuh politisi asal Mengwi itu.

Sasaran lainnya melalui pajak online ini, kata Satria, banyaknya transaksi yang diselesaikan di luar negeri, termasuk uang-uangnya. Misalnya tamu-tamu dari Korea telah melakukan transaksi hotel, restoran, hiburan, dan perjalanan di Korea. Karena itu, Bali hanya memberikan pelayanan kepada tamu-tamu tersebut. Transaksi seperti ini banyak *lost* dari pajak. "Ini akan menjadi atensi kami lewat pansus pajak online ini," tegasnya.

Sementara itu, ombak di Pantai Kuta yang terlihat lebih tinggi dari hari biasanya membuat girang para turis yang datang ke Badung. Sebab ombak tinggi yang mencapai 2,5 meter dengan kecepatan angin 25-30 km/jam justru cukup ideal untuk melakukan surfing. (san/yes)

Edisi : Jumat, 9 Oktober 2015

Hal. : 25 dan 35